

---

## Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Metode Kelulusan Skripsi dan Non-Skripsi di Perguruan Tinggi

Adisurya<sup>1</sup>, Chondro Kismo Pratomo<sup>2</sup>  
Universitas Bojonegoro  
[adisurya2099@yahoo.com](mailto:adisurya2099@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi metode kelulusan di perguruan tinggi Indonesia, baik melalui skripsi maupun non-skripsi, dengan memperhatikan landasan hukum, kendala yang dihadapi, dan implikasi yuridisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Statute, Konseptual, dan Historis. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi hukum memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk menentukan metode kelulusan, tetapi beragam interpretasi dan aplikasi menghasilkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara teori dan praktik. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas administratif. Untuk mengatasi hal ini, perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas bimbingan, mengoptimalkan sumber daya, dan menyederhanakan prosedur administratif. Kesimpulannya, implementasi metode kelulusan yang baik akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan reputasi institusi, sejalan dengan standar nasional dan internasional yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Metode Kelulusan, Perguruan tinggi, Skripsi, Non-skripsi.

### Abstract

*This study aims to examine the implementation of graduation methods in Indonesian universities, both through thesis and non-thesis routes, considering the legal framework, challenges faced, and its juridical implications. The research method used is normative legal research with Statute, Conceptual, and Historical approaches. The results indicate that legal regulations provide autonomy to universities to determine graduation methods, but various interpretations and applications result in legal uncertainty and a gap between theory and practice. Challenges faced include limitations in human resources and administrative complexity. To address this, universities need to improve guidance quality, optimize resources, and simplify administrative procedures. In conclusion, effective implementation of graduation methods will enhance the quality of higher education and institutional reputation, in line with established national and international standards.*

**Keywords:** Graduation Methods, Universities, Thesis, Non-thesis.

## **Pendahuluan**

Dalam upaya membuat potensi manusia lebih bermanfaat sepanjang hidup mereka, pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi mereka, baik secara fisik maupun mental. Dasar pendidikan terdiri dari prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk hidup harmonis, untuk mencapai tujuan kehidupan manusia secara sistematis, harmonis dan aktif. Hanya dengan merujuk pada dasar yang kuat pendidikan dapat dilakukan dengan baik, dengan tujuan yang jelas, materi kurikulum yang relevan, dan metode yang efektif dan efisien.

Salah satu hak yang paling penting adalah memiliki akses ke pendidikan. Sesuai dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD 1945, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, seperti yang dinyatakan di Pasal 28C UUD 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin hak warga negara atas pendidikan serta pelaksanaannya sendiri, serta mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan sambil mempertahankan prinsip-prinsip agama dan kesatuan nasional untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Hak warga negara terhadap pendidikan yang memadai dan berkualitas dijamin sepenuhnya oleh konstitusi.

Konsep pendidikan di Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat dalam prakteknya. Hal ini diperlukan dalam dunia pendidikan termasuk di perguruan tinggi di Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Metode kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi memegang peranan penting sebagai instrumen penilaian akhir atas kompetensi dan capaian akademik mahasiswa. Secara tradisional, skripsi telah menjadi metode kelulusan yang paling umum digunakan, di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan penelitian mandiri sebagai bagian dari proses pendidikan mereka. Skripsi dianggap sebagai puncak dari pendidikan sarjana yang menguji kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penulisan ilmiah

mahasiswa. Namun, dengan semakin beragamnya kebutuhan dan tantangan dalam dunia pendidikan serta perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, metode kelulusan non-skripsi mulai diperkenalkan dan diadopsi oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Metode ini mencakup berbagai bentuk tugas akhir alternatif seperti proyek penelitian, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain yang dianggap setara dengan skripsi. Implementasi kedua metode kelulusan ini menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang membutuhkan analisis mendalam.

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan fakta dan pengetahuan yang jelas tentang topik tertentu. Selain itu, informasi ini dikombinasikan untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah yang dapat diandalkan. Pada tingkat akhir, sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan saat bekerja pada proyek akhir mereka atau skripsi. Skripsi adalah tahap terakhir dalam pendidikan seorang mahasiswa. Skripsi disiapkan sebagai persyaratan lulus untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang studi mereka (Hadi, 1980).

Untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat universitas, seorang mahasiswa harus melalui jalur lulus. Saat ini, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta semakin kompetitif. Setiap perguruan tinggi tidak lepas dari program yang bertujuan untuk meningkatkan akreditasi mereka, seperti contoh upaya dalam menghasilkan lulusan berkualitas. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menawarkan dua pilihan lulus: skripsi dan non-skripsi. Dalam jalur skripsi, mahasiswa diminta untuk menyusun makalah ilmiah berdasarkan penelitian lapangan dan / atau literatur. Dalam jalur non-skripsi, alih-alih menulis makalah ilmiah, mahasiswa diberikan pilihan untuk menyelesaikan studi selain dengan menyusun skripsi. Pilihan pada jalur non-skripsi tentunya ada berbagai macam, tergantung pada program yang ditawarkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Implementasi metode kelulusan skripsi dan non-skripsi harus merujuk pada kerangka hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, menjadi landasan hukum utama yang mengatur metode kelulusan di perguruan tinggi. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menentukan metode kelulusan asalkan memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai interpretasi dan aplikasi yang berbeda-beda di antara perguruan tinggi. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum, keseragaman standar, dan perlindungan hak-hak akademik mahasiswa. Salah satu isu utama yang perlu dikaji adalah apakah implementasi metode kelulusan non-skripsi dapat memberikan pengujian akademis yang setara dengan skripsi dalam hal rigor ilmiah dan validitas akademik.

Pengawasan dan penjaminan mutu terhadap implementasi metode kelulusan skripsi dan non-skripsi juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga penjaminan mutu internal perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa metode kelulusan yang diterapkan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah penurunan kualitas pendidikan dan untuk memastikan bahwa setiap metode kelulusan memberikan kesempatan yang adil bagi semua mahasiswa untuk menunjukkan kompetensi akademik mereka. Dalam konteks ini, analisis normatif akan mencakup evaluasi terhadap mekanisme penjaminan mutu yang ada, serta peran pengawasan dari BAN-PT dalam mengaudit dan mengevaluasi program studi yang menerapkan metode kelulusan non-skripsi.

Peneliti melalui penelitian ini ingin mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur metode kelulusan skripsi dan non-skripsi di perguruan tinggi. Dengan menganalisis undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan perguruan tinggi yang relevan, peneliti akan dapat memahami landasan hukum yang menjadi dasar dari implementasi kedua metode kelulusan ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, peneliti berharap dapat mengidentifikasi

kesenjangan antara teori dan praktik yang mungkin menjadi sumber permasalahan hukum dalam implementasi metode kelulusan tersebut.

Selain itu, peneliti juga ingin menelaah konsekuensi yuridis dari penggunaan metode kelulusan skripsi dan non-skripsi di perguruan tinggi. Hal ini mencakup analisis terhadap perlindungan hak-hak akademik mahasiswa, kesetaraan dalam penerapan standar penilaian, serta dampak hukum dari perbedaan metode kelulusan terhadap pengakuan gelar sarjana dan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Dengan memperdalam pemahaman terhadap aspek-aspek yuridis ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang implikasi hukum dari penggunaan metode kelulusan skripsi dan non-skripsi.

Rekomendasi yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih adil dalam sistem kelulusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada aturan hukum positif yang terkait dengan hukum. Metode ini diterapkan dengan memeriksa setiap hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum saat ini. Penulis menggunakan dua pendekatan penelitian: *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*, dan *Historical Approach*. *Statute Approach* memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual mengambil gagasan dan prinsip yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum. Pendekatan historis, di sisi lain, digunakan untuk memahami filosofi yang telah membentuk aturan hukum dari waktu ke waktu, serta perubahan dan perkembangan dalam filsafat yang mendasari aturan hukum

tersebut. Metode ini digunakan dengan mempelajari latar belakang dan evolusi peraturan yang menangani masalah hukum.

Bahan hukum terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum utama meliputi undang-undang, catatan resmi atau protokol yang terkait dengan pembuatan Undang-Undang, dan keputusan pengadilan. Untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum, literatur ini adalah sumber penting dalam penelitian hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder menjelaskan materi hukum primer, yang dikumpulkan dari penelitian perpustakaan, seperti artikel, buku, dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kerangka Hukum yang Mengatur Metode Kelulusan di Perguruan Tinggi**

Landasan hukum yang mengatur metode kelulusan di perguruan tinggi terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat (3) UU ini menyatakan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa pada program sarjana dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk skripsi, tugas akhir, ujian kompetensi, atau metode lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Selain itu, metode kelulusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 37 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menentukan metode kelulusan, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. UU Pendidikan Tinggi memberikan otonomi yang luas bagi perguruan tinggi untuk menentukan metode kelulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi perguruan tinggi yang ditekankan dalam UU tersebut.

Namun, meskipun memiliki otonomi, perguruan tinggi tetap harus mematuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib mematuhi standar nasional pendidikan tinggi. UU ini memberikan fleksibilitas

kepada perguruan tinggi untuk menentukan metode kelulusan yang sesuai dengan karakteristik program studi dan kebutuhan dunia kerja, selama tetap dalam kerangka standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, yang semuanya harus dijadikan acuan oleh perguruan tinggi dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan.

Selain UU Nomor 12 Tahun 2012, regulasi yang lebih spesifik tentang metode kelulusan juga diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan ini, terutama pada pasal 17, dijelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk dan prosedur evaluasi akhir mahasiswa, yang dapat berupa skripsi, tugas akhir, proyek, atau bentuk evaluasi lain yang relevan dengan program studi. Peraturan ini menekankan pentingnya metode penilaian yang beragam dan relevan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang komprehensif dan sesuai dengan tuntutan profesional di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, metode non-skripsi seperti proyek atau tugas akhir yang berbasis pada praktik lapangan juga dianggap sah dan valid sebagai metode penilaian akhir.

Selain UU Pendidikan Tinggi, regulasi yang lebih rinci mengenai metode kelulusan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud tersebut memberikan pedoman tentang standar nasional yang harus dipatuhi oleh perguruan tinggi dalam menetapkan metode kelulusan, serta memberikan ruang otonomi bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, termasuk standar mengenai metode kelulusan. Salah satu hal yang diatur dalam permendikbud ini adalah bahwa metode kelulusan yang diterapkan oleh perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa untuk menyelesaikan studi mereka dengan syarat kelulusan

yang jelas dan transparan. Meskipun memberikan ruang otonomi, Permendikbud ini juga menekankan pentingnya penjaminan mutu dalam pelaksanaan metode kelulusan, yang mencakup evaluasi dan monitoring secara berkala oleh lembaga terkait, termasuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bertugas melakukan akreditasi terhadap program studi di perguruan tinggi, termasuk evaluasi terhadap metode kelulusan yang diterapkan. Dalam menjalankan fungsinya, BAN-PT akan menilai apakah metode kelulusan yang diterapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan, keadilan, dan relevansi metode kelulusan dengan tujuan pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Selain BAN-PT, lembaga penjaminan mutu internal perguruan tinggi juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi implementasi metode kelulusan. Lembaga ini bertugas untuk melakukan evaluasi secara internal terhadap kualitas dan efektivitas sistem pendidikan yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Dalam hal metode kelulusan, lembaga penjaminan mutu internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap metode kelulusan yang diterapkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Hal ini termasuk memastikan bahwa prosedur penilaian, kriteria kelulusan, dan mekanisme penjaminan mutu telah diatur dengan jelas dan transparan.

Selain lembaga penjaminan mutu, dosen dan staf pengajar di perguruan tinggi juga memiliki peran yang penting dalam implementasi metode kelulusan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan panduan, pengawasan, dan penilaian terhadap mahasiswa selama proses penulisan skripsi atau pengerjaan tugas akhir non-skripsi. Dosen juga memiliki peran dalam memastikan bahwa metode kelulusan yang diterapkan sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh perguruan tinggi. Dalam hal ini, penting bagi perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang cukup kepada dosen dalam melaksanakan tugas ini, sehingga dapat tercipta lingkungan akademik yang kondusif untuk pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

Pemahaman yang jelas mengenai regulasi pemerintah ini penting bagi perguruan tinggi dalam merancang metode kelulusan yang efektif dan sesuai standar. Implementasi metode kelulusan yang beragam tidak hanya harus memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga harus mempertimbangkan relevansi dan aplikabilitasnya di dunia kerja. Dengan demikian, perguruan tinggi perlu memastikan bahwa metode penilaian yang digunakan dapat mengukur berbagai aspek kompetensi mahasiswa secara komprehensif, termasuk kemampuan analitis, pemecahan masalah, dan keterampilan praktis. Fleksibilitas yang diberikan oleh regulasi ini memungkinkan perguruan tinggi untuk berinovasi dalam metode kelulusan, namun tetap dalam koridor standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Peran dan implementasi kebijakan institusi pendidikan dinilai cukup penting dalam proses penetapan dan pelaksanaan metode kelulusan, baik skripsi maupun non-skripsi. Kebijakan institusi pendidikan merupakan panduan dan pedoman internal yang digunakan oleh perguruan tinggi dalam menetapkan aturan dan prosedur terkait metode kelulusan. Kebijakan ini mencakup berbagai hal, mulai dari kriteria penilaian, prosedur pengajuan judul skripsi atau tugas akhir non-skripsi, hingga mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu.

Salah satu aspek penting dari kebijakan institusi pendidikan khususnya pada perguruan tinggi adalah ketersediaan pedoman yang jelas dan terinci bagi mahasiswa. Pedoman ini harus mencakup informasi yang lengkap mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, prosedur yang harus diikuti, dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir non-skripsi. Dengan memiliki pedoman yang jelas, mahasiswa akan lebih mampu memahami ekspektasi dan tuntutan yang harus dipenuhi, sehingga proses kelulusan dapat berjalan dengan lebih lancar dan transparan.

Selain itu, kebijakan institusi pendidikan juga perlu mencakup mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu yang efektif. Hal ini mencakup penugasan dosen pembimbing yang berkualitas dan berkompeten, serta prosedur evaluasi yang ketat

terhadap skripsi atau tugas akhir non-skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. Selain itu, kebijakan ini juga harus memuat informasi mengenai prosedur banding atau pengaduan bagi mahasiswa yang merasa tidak puas dengan hasil penilaian atau perlakuan yang diterimanya. Dengan demikian, kebijakan institusi pendidikan tidak hanya menjadi panduan bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kualitas dan integritas proses kelulusan di perguruan tinggi.

Pentingnya kebijakan institusi pendidikan dalam mengatur metode kelulusan juga tercermin dalam upaya perguruan tinggi untuk memperbaharui dan meningkatkan kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Hal ini mencakup evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang ada, serta penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian, kebijakan institusi pendidikan tidak hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta keadilan dalam proses kelulusan di perguruan tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menyoroti peran penting dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dalam mengatur metode kelulusan. SNPT merupakan seperangkat standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi yang konsisten dan berkualitas di seluruh Indonesia. Dalam konteks metode kelulusan, SNPT berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam menetapkan dan melaksanakan metode kelulusan, baik yang berbasis skripsi maupun non-skripsi.

Menetapkan standar yang jelas mengenai kriteria kelulusan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa merupakan salah satu aspek penting dari SNPT. Standar ini mencakup berbagai hal, mulai dari jumlah sks yang harus ditempuh, nilai minimal yang harus dicapai, hingga syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan skripsi atau tugas akhir non-skripsi. Dengan memiliki standar yang jelas, perguruan tinggi akan lebih mampu menjamin bahwa setiap mahasiswa

telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, SNPT juga mencakup standar mengenai proses penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk dalam konteks metode kelulusan. Standar ini menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi metode kelulusan di setiap perguruan tinggi, serta peningkatan terus-menerus terhadap kualitas proses pendidikan. Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan untuk secara aktif melibatkan dosen, staf administrasi, dan mahasiswa dalam upaya memastikan bahwa metode kelulusan yang diterapkan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

SNPT memberikan kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa untuk menyelesaikan studi mereka dengan menggunakan metode kelulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individual. Dengan demikian, perguruan tinggi diharapkan untuk secara aktif mengadopsi pendekatan inklusif dan menyediakan berbagai pilihan metode kelulusan yang dapat menyesuaikan dengan beragam latar belakang dan kemampuan mahasiswa.

### **Prosedur dan Mekanisme Implementasi dalam Metode Kelulusan Skripsi dan Non-Skripsi di Perguruan Tinggi**

Prosedur dan mekanisme implementasi metode kelulusan di perguruan tinggi, baik itu skripsi maupun non-skripsi, harus dimulai dengan penyusunan panduan yang komprehensif dan jelas oleh masing-masing fakultas atau program studi. Panduan ini harus merinci semua tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa, mulai dari pemilihan topik atau proyek, bimbingan dengan dosen, hingga tahap evaluasi akhir. Untuk metode kelulusan skripsi, biasanya dimulai dengan seminar proposal, di mana mahasiswa mempresentasikan rencana penelitian mereka dan menerima masukan dari pembimbing serta penguji. Selanjutnya, mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan rencana yang telah disetujui, kemudian menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Proses ini diakhiri dengan sidang skripsi, di mana mahasiswa

mempresentasikan hasil penelitian mereka di hadapan komite penguji yang akan menilai apakah penelitian tersebut memenuhi standar akademik yang ditetapkan.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa dalam menulis skripsi: faktor internal yang berasal dari mahasiswa sendiri, dan faktor eksternal yang datang dari lingkungan luar (Syah, 1997). Mahasiswa menghadapi masalah saat menulis skripsi mereka. Faktor internal berkaitan dengan kurangnya pemahaman siswa tentang proses skripsi. Misalnya, seorang mahasiswa mungkin sudah memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, survei, dan metode lainnya, tetapi setelah mereka memiliki data, mereka menjadi bingung tentang cara menggunakannya. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial, termasuk rekan dan dosen. Berinteraksi dengan rekan-rekan mahasiswa yang juga bekerja pada skripsi mereka dapat bermanfaat dan bermasalah. Masalah besar lainnya muncul ketika dosen pembimbing yang seharusnya membantu, seperti enggan memberikan bantuan, sehingga membuat mahasiswa kesulitan untuk mengerjakan dan menyelesaikan sebab tidak komunikatif/kooperatif dengan mahasiswa bimbingannya (Asmawan, 2016).

Mahasiswa mengalami kesulitan saat menulis skripsi mereka bahkan ketika mereka memulai dengan proposal. Mereka biasanya berjuang dengan menulis bab 1 hingga 3, dari latar belakang ke metodologi penelitian. Rencana penelitian yang akan dilakukan dijelaskan dalam proposal penelitian. Proposal penelitian adalah tahap awal dari penelitian yang luas yang akan dilakukan mahasiswa. Semua mahasiswa yang akan lulus pasti akan menghadapi tahap menulis proposal penelitian. Dosen penguji akan mengevaluasi proposal tersebut dan kemudian akan merekomendasikan bahwa mahasiswa tersebut layak untuk melanjutkan penelitiannya atau tidak. Pada bagian ini mahasiswa sudah mengalami kesulitan saat menulis bagian latar belakang di bab pertama (Zuriati, 2017).

Salah satu aspek penting dari tantangan yang dihadapi mahasiswa saat menulis skripsi adalah ketakutan yang mereka alami sebelum ujian (Rismen, 2015). Ujian proposal dan siding skripsi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh

mahasiswa selama proses menyelesaikan skripsi. Mahasiswa biasanya akan mengalami perilaku maladaptive seperti tidak memiliki waktu untuk makan sebelum ujian berakhir. Hal ini disebabkan oleh ketakutan yang berlebihan bahwa apa yang telah mereka persiapkan akan tiba-tiba dilupakan (Kencana & Muzzamil, 2022). Bagi mahasiswa, masalah terbesar dalam menyelesaikan studi mereka adalah skripsi. Karena skripsi merupakan sesuatu yang berbeda apabila dibandingkan dengan tugas kuliah biasa yang diberikan oleh masing-masing dosen pada setiap mata kuliah. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi mereka jika tugas kuliah tidak selesai pada tanggal yang ditentukan. Mahasiswa yang belum siap masih harus menyerahkan tugas dan mengambil ujian untuk tetap melanjutkan perkuliahan mereka pada semester berikutnya. Berbeda dengan skripsi, mahasiswa harus benar-benar siap yang ditandai dengan selesainya penulisan sebagai indikatornya. Tidak jarang skripsi yang menyebabkan masa studi mahasiswa menjadi begitu lama, bahkan berujung pada dikeluarkan (*drop-out*) (Mariamah, Faridah, Ratnah, dan Suratman, 2016).

Meskipun begitu, untuk menyelesaikan pembelajaran di perguruan tinggi maka mahasiswa harus menulis skripsi. Memang pada perkembangannya banyak model non-skripsi yang bisa membuat mahasiswa lulus. Namun secara umum skripsi masih menjadi persyaratan. Oleh karena itu mahasiswa harus dibekali kemampuan menulis skripsi. Meskipun sebenarnya dalam kurikulum telah ada mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk menulis skripsi tapi pada semester akhir tetap saja ditemukan kesulitan pada mahasiswa. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya jasa pembuatan skripsi yang menjatuhkan wibawa dan intelektual mahasiswa (Darmansyah, 2023).

Sementara itu, prosedur untuk metode non-skripsi bisa lebih bervariasi tergantung pada jenis proyek atau tugas akhir yang ditetapkan oleh program studi. Sebagai contoh, untuk tugas akhir berupa proyek atau produk, mahasiswa mungkin harus melalui beberapa tahap seperti proposal proyek, pembuatan prototipe, uji coba, dan akhirnya presentasi atau demonstrasi hasil akhir. Dalam kasus tugas akhir berbasis magang atau praktek kerja, prosedurnya mencakup perencanaan dan

pelaksanaan magang, penyusunan laporan kerja, serta evaluasi kinerja oleh supervisor di tempat magang dan dosen pembimbing. Setiap tahapan ini harus didokumentasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Proses ini sering kali juga melibatkan penilaian kualitatif dan kuantitatif dari hasil kerja mahasiswa, yang mencakup aspek-aspek seperti inovasi, penerapan teori ke dalam praktik, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja nyata.

Mekanisme implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan institusi pendidikan. Untuk mendukung hal ini, perguruan tinggi biasanya membentuk komite atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memfasilitasi proses kelulusan. Tim ini memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah disusun dan membantu mengatasi kendala yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa. Selain itu, institusi perlu menyediakan sumber daya yang memadai, seperti akses ke perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau proyek. Mekanisme pengawasan dan umpan balik yang teratur juga penting untuk memastikan bahwa mahasiswa tetap berada di jalur yang benar dan mendapatkan bimbingan yang diperlukan sepanjang proses. Dengan demikian, proses implementasi metode kelulusan skripsi dan non-skripsi di perguruan tinggi dapat berjalan lancar dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

### **Implementasi Metode Kelulusan Skripsi dan Non-Skripsi di Perguruan Tinggi**

Implementasi metode kelulusan baik skripsi maupun non-skripsi di perguruan tinggi menghadapi sejumlah tantangan dan kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi prosesnya. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Mahasiswa sering kali menghadapi kesulitan dalam menerapkan konsep teoretis yang dipelajari selama kuliah ke dalam penelitian atau proyek praktis. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengalaman praktis,

keterbatasan akses ke fasilitas penelitian, atau minimnya kesempatan untuk berinteraksi dengan industri terkait. Akibatnya, banyak mahasiswa yang mengalami kebingungan atau kesulitan dalam merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil penelitian mereka. Tantangan ini memerlukan bimbingan yang intensif dan konsisten dari dosen pembimbing yang berpengalaman serta dukungan institusi dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai.

Selain itu, tantangan dalam hal sumber daya manusia juga sangat signifikan. Banyak perguruan tinggi menghadapi kendala dengan jumlah dosen pembimbing yang terbatas dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang perlu dibimbing. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang berat bagi dosen, yang bisa berujung pada kurang optimalnya bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen pembimbing yang terlalu sibuk mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan masukan yang mendalam atau untuk memonitor kemajuan penelitian mahasiswa secara efektif. Selain itu, variasi kualitas dosen pembimbing dalam hal pengetahuan dan pengalaman juga dapat mempengaruhi kualitas bimbingan. Untuk mengatasi tantangan ini, perguruan tinggi perlu mempertimbangkan rasio dosen-mahasiswa yang lebih seimbang serta menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi dosen untuk memastikan mereka dapat memberikan bimbingan yang berkualitas.

Kendala administratif dan birokrasi juga sering kali menjadi penghalang dalam proses implementasi metode kelulusan. Prosedur yang kompleks dan berbelit-belit dapat memperlambat proses penyelesaian tugas akhir atau proyek. Misalnya, persyaratan administratif seperti pengajuan proposal penelitian, persetujuan etika penelitian, dan pendaftaran sidang akhir bisa memakan waktu lama dan membebani mahasiswa dengan banyaknya dokumen yang harus disiapkan. Kendala ini diperburuk oleh sistem informasi yang kurang terintegrasi dan tidak efisien di beberapa perguruan tinggi, sehingga menyulitkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kelulusan. Untuk mengatasi kendala ini, perguruan tinggi perlu mengembangkan sistem manajemen informasi yang lebih baik dan prosedur administratif yang lebih sederhana dan transparan. Dengan demikian, mahasiswa

dapat lebih fokus pada substansi penelitian atau proyek mereka tanpa terganggu oleh hambatan birokratis yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, tantangan dan kendala dalam implementasi metode kelulusan skripsi dan non-skripsi di perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk diatasi. Perguruan tinggi perlu mengadopsi strategi yang mencakup peningkatan kualitas bimbingan, optimalisasi sumber daya, serta penyederhanaan prosedur administratif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa proses kelulusan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Implementasi metode kelulusan yang baik juga akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan, sejalan dengan standar nasional dan internasional yang ditetapkan (Saepudin, 2018).

Implementasi metode kelulusan di perguruan tinggi dapat dilihat dari pengalaman Bayu Eko Moektito, yang lebih dikenal dengan nama Bayu SKAK, seorang konten kreator dan aktor film yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Malang (UM) melalui proyek non-skripsi yang inovatif. Bayu dinyatakan lulus pada tahun 2018 setelah menghasilkan sebuah film berjudul "Yo Wis Ben" yang ditayangkan di bioskop sebagai bagian dari proyek kelulusannya. Kasus ini mencerminkan bagaimana universitas dapat menerapkan metode kelulusan non-skripsi secara efektif dengan mengakui proyek kreatif dan praktis sebagai alternatif valid dari skripsi tradisional (kliping-um, 2018).

Bayu SKAK memilih jalur non-skripsi dengan membuat film "Yo Wis Ben" sebagai proyek akhir yang menggantikan tugas skripsi. Film ini, yang merupakan karya komedi berlatar budaya Jawa, tidak hanya menunjukkan kemampuan Bayu dalam bidang seni dan media, tetapi juga keterampilan manajerial dan kolaborasi yang diperlukan untuk produksi film profesional. Proses pembuatan film melibatkan berbagai tahap yang kompleks, mulai dari penulisan skenario, casting, pengambilan gambar, hingga pemasaran dan distribusi. Setiap tahap memerlukan perencanaan

yang matang, koordinasi dengan tim produksi, dan manajemen anggaran. Universitas Negeri Malang mengakui bahwa proyek ini memenuhi kriteria akademis dan praktis yang mereka tetapkan, karena Bayu mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa studinya dalam sebuah proyek nyata yang memiliki dampak luas (kliping-um, 2018).

Penerimaan proyek film Bayu SKAK sebagai metode kelulusan non-skripsi oleh UM menunjukkan fleksibilitas institusi dalam menilai berbagai bentuk kompetensi mahasiswa. Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor utama: relevansi proyek dengan bidang studi mahasiswa, tingkat keterampilan yang ditunjukkan, serta dampak dan pencapaian proyek tersebut. "Yo Wis Ben" tidak hanya berhasil sebagai film komersial yang ditayangkan di bioskop, tetapi juga menjadi fenomena budaya yang mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kreatif dapat memiliki nilai akademis yang setara dengan skripsi tradisional, asalkan proyek tersebut dilakukan dengan standar profesional yang tinggi dan memberikan kontribusi nyata bagi bidang terkait (kliping-um, 2018).

Kelulusan Bayu SKAK di Universitas Negeri Malang menyoroti beberapa aspek penting dalam implementasi metode kelulusan non-skripsi di perguruan tinggi. Pertama, institusi harus memiliki kerangka evaluasi yang jelas dan fleksibel untuk menilai berbagai bentuk proyek akhir, baik skripsi maupun non-skripsi. Kedua, pentingnya bimbingan yang memadai dari dosen pembimbing yang mampu mendukung mahasiswa dalam menjalankan proyek kreatif dan praktis. Ketiga, pengakuan terhadap proyek non-skripsi harus mempertimbangkan nilai praktis dan dampak nyata dari proyek tersebut, serta bagaimana proyek tersebut mencerminkan aplikasi pengetahuan dan keterampilan akademis. Dengan mengakui proyek seperti "Yo Wis Ben" sebagai bentuk kelulusan yang valid, Universitas Negeri Malang menunjukkan bahwa mereka mendukung inovasi dan kreativitas mahasiswa, serta siap beradaptasi dengan kebutuhan dan potensi mahasiswa yang beragam (kliping-um, 2018).

Selanjutnya ada implementasi metode kelulusan melalui publikasi jurnal ilmiah membawa beberapa keuntungan signifikan. Pertama, ini meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan penelitian yang diterima mahasiswa. Dengan menargetkan publikasi di jurnal terakreditasi, mahasiswa harus memastikan bahwa penelitian mereka mencapai standar akademik yang tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan mereka dalam metodologi penelitian, analisis data, dan penulisan ilmiah. Kedua, metode ini meningkatkan reputasi akademik institusi. Setiap publikasi yang berhasil tidak hanya menambah daftar kontribusi ilmiah dari universitas tersebut tetapi juga memperkuat jaringan kolaborasi internasional dan memperluas pengaruh akademiknya. Terakhir, lulusan yang telah mempublikasikan karya mereka di jurnal ilmiah memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja dan di dunia akademik. Mereka diakui memiliki keterampilan riset yang solid dan kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam bidang mereka, baik melalui penelitian lanjutan atau aplikasi praktis di industri. Dengan demikian, implementasi metode kelulusan berbasis publikasi jurnal ilmiah tidak hanya meningkatkan kualitas akademik dan profesionalisme mahasiswa tetapi juga memperkuat posisi institusi di panggung akademik global (Ratnasari & Nurislaminingsih, 2017).

Berdasarkan contoh kasus di atas, mahasiswa jelas memiliki hak untuk memahami dengan jelas prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai kelulusan, baik itu melalui skripsi maupun proyek non-skripsi. Kepastian hukum ini mencakup informasi yang transparan dan mudah diakses mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui, batas waktu yang ditetapkan, serta kriteria penilaian yang akan digunakan. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang proses kelulusan, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari kebingungan atau ketidakpastian yang dapat mengganggu perjalanan akademik mereka.

Selain itu, kepastian hukum juga termasuk dan berkaitan dengan perlindungan hak-hak mahasiswa selama proses kelulusan berlangsung. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua

mahasiswa, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merugikan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan bimbingan yang memadai dari dosen pembimbing, hak untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir atau proyek, serta hak untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan objektif mengenai kinerja akademis mereka. Dengan memastikan bahwa hak-hak ini dijamin dan dilindungi, perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mahasiswa untuk mencapai potensi akademik dan profesional mereka dengan maksimal ([www.bamawa.isi.ac.id](http://www.bamawa.isi.ac.id)).

Kemudian, berkaitan dengan tanggung jawab institusi dalam menegakkan standar akademik dan integritas dalam proses kelulusan. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa evaluasi terhadap karya mahasiswa dilakukan dengan adil dan objektif, tanpa adanya intervensi atau pengaruh yang tidak sah. Ini termasuk penegakan kode etik akademik dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses kelulusan. Dengan menjaga kepatuhan terhadap standar-standar ini, institusi dapat memastikan bahwa gelar yang diberikan kepada mahasiswa adalah hasil dari usaha dan prestasi yang sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan. Dengan demikian, kepastian hukum bagi mahasiswa tidak hanya melindungi hak-hak mereka, tetapi juga memastikan integritas dan kredibilitas dari gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi (Universitas Padjadjaran, 2023).

Implementasi metode kelulusan skripsi dan non-skripsi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan dan mutu akademik yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Kualitas pendidikan merujuk pada kemampuan perguruan tinggi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas kepada mahasiswa, sedangkan mutu akademik mengacu pada standar akademik yang diterapkan dalam menilai kinerja dan pencapaian mahasiswa. Metode kelulusan yang efektif harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (KEMDIKBUD, 2023).

Implementasi metode kelulusan yang baik harus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Proses penelitian skripsi atau proyek non-skripsi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami suatu bidang studi secara mendalam dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks yang relevan dan nyata. Melalui bimbingan dosen pembimbing yang baik dan akses terhadap sumber daya yang memadai, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan komunikasi yang penting untuk berhasil dalam karier profesional mereka. Dengan demikian, metode kelulusan yang mempromosikan pengalaman belajar yang aktif dan terlibat dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kemudian, metode kelulusan yang efektif juga dapat meningkatkan mutu akademik mahasiswa. Evaluasi kinerja mahasiswa dalam penelitian skripsi atau proyek non-skripsi memungkinkan perguruan tinggi untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks praktis. Standar penilaian yang jelas dan kriteria yang ketat dapat memastikan bahwa mahasiswa mencapai tingkat kompetensi yang memadai sebelum mereka dinyatakan lulus. Selain itu, feedback yang diberikan oleh dosen pembimbing dan panel penguji dapat membantu mahasiswa untuk terus meningkatkan kualitas karya mereka dan mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut. Metode kelulusan yang berorientasi pada peningkatan mutu akademik dapat meningkatkan reputasi dan prestise perguruan tinggi secara keseluruhan.

Implementasi metode kelulusan yang baik dapat memfasilitasi upaya peningkatan mutu akademik secara institusional. Dengan mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan menghasilkan karya-karya yang bermutu, perguruan tinggi dapat membangun basis pengetahuan yang kuat dan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, metode kelulusan yang mempromosikan keterlibatan mahasiswa dalam proyek-proyek praktis dan kolaboratif dengan industri atau lembaga eksternal dapat membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan inovasi yang saling

menguntungkan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial melalui penelitian dan pengembangan. Metode kelulusan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu akademik, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa.

Implementasi metode kelulusan yang baik dapat meningkatkan reputasi sebuah perguruan tinggi. Proses kelulusan skripsi dan non-skripsi yang transparan, adil, dan berkualitas dapat menciptakan kesan positif di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Mahasiswa yang lulus dengan kualifikasi yang baik dan karya-karya yang bermutu dapat menjadi duta yang baik bagi institusi mereka, memberikan testimonial positif tentang pengalaman belajar mereka di perguruan tinggi tersebut. Selain itu, publikasi dan pengakuan terhadap karya-karya mahasiswa yang luar biasa dapat meningkatkan visibilitas institusi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan demikian, implementasi metode kelulusan yang efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi sebuah perguruan tinggi dan meningkatkan daya tariknya bagi calon mahasiswa dan pembiaya.

Reputasi merupakan hasil penilaian kolektif dari pihak luar terhadap individu atau suatu organisasi. Reputasi ini terbentuk karena kinerja serta kualitas individu atau organisasi yang bersifat jangka panjang. Perguruan tinggi seharusnya membangun reputasinya dengan menonjolkan ciri khas yang dimiliki, yang harus disesuaikan dengan harapan para pemangku kepentingan. Ciri khas tersebut harus terus dikomunikasikan untuk membentuk citra positif perguruan tinggi yang pada akhirnya akan dinilai oleh semua pemangku kepentingan berdasarkan faktor-faktor yang menyertainya, termasuk pengalaman mereka saat berinteraksi dengan perguruan tinggi. Penilaian dari para pemangku kepentingan ini akan memengaruhi reputasi perguruan tinggi secara keseluruhan. Kualitas reputasi perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kualitas layanan perkuliahan dan pelayanan administrasi akademik (Turnip, Rosmiati, & Nasori, 2022). Reputasi yang baik dan akreditasi yang tinggi dapat saling memperkuat satu sama lain. Reputasi yang baik

dapat meningkatkan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh sebuah perguruan tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik institusi bagi calon mahasiswa dan pemberi dana.

Metode kelulusan yang berkualitas juga dapat berkontribusi terhadap akreditasi institusi. Proses akreditasi sering kali melibatkan penilaian terhadap standar akademik, kualitas pembelajaran, dan efektivitas sistem evaluasi yang diterapkan oleh sebuah perguruan tinggi. Metode kelulusan skripsi dan non-skripsi yang didukung oleh proses pembimbingan yang baik, standar penilaian yang jelas, dan umpan balik yang konstruktif dapat menunjukkan komitmen institusi terhadap kualitas pendidikan dan mutu akademik. Dengan demikian, implementasi metode kelulusan yang sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan oleh badan akreditasi dapat membantu perguruan tinggi untuk mencapai atau mempertahankan status akreditasi yang baik, yang penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas institusi di mata masyarakat dan dunia industri.

Akreditasi adalah proses pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hasil dari akreditasi ini berupa pengakuan peringkat kelayakan. Proses akreditasi ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi Perguruan Tinggi yang sebenarnya dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Akreditasi yang tinggi menunjukkan adanya bukti independen mengenai kualitas pendidikan yang diberikan oleh institusi, yang memberikan kepastian dan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi tersebut lebih unggul dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas akreditasi. Untuk melaksanakan akreditasi, Perguruan Tinggi harus memiliki izin operasional yang masih berlaku dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan telah melakukan evaluasi diri. Kedua prasyarat tersebut harus dilampirkan saat mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT, serta harus menyerahkan laporan berupa borang untuk program studi pada jenjang diploma dan sarjana (S1) (Yayuk Zulaikah, Mujamil Qomar, & Abd. Aziz, 2024).

Dengan demikian, reputasi yang baik dan akreditasi yang tinggi dapat saling memperkuat citra sebuah perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan profesional, serta meningkatkan daya saingnya di pasar pendidikan tinggi yang semakin kompetitif .

### **Kesimpulan**

Implementasi metode kelulusan di perguruan tinggi, baik skripsi maupun non-skripsi, diatur oleh regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan berbagai peraturan turunannya, yang memberikan fleksibilitas kepada institusi untuk menentukan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Peraturan seperti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan kerangka yang memungkinkan pengembangan metode penilaian yang beragam sambil mematuhi standar nasional pendidikan tinggi. Regulasi ini menekankan penilaian relevan dengan tuntutan profesional untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi komprehensif. Institusi diberi kewenangan untuk memilih bentuk evaluasi akhir, seperti skripsi atau proyek, selama tetap menjaga mutu pendidikan tinggi nasional. Namun, kendala dalam implementasi meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan administratif dan birokrasi. Mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam menerapkan konsep teoretis yang memerlukan bimbingan intensif dari dosen berpengalaman, sedangkan rasio dosen-mahasiswa yang tidak seimbang dan prosedur administratif yang rumit dapat memperlambat penyelesaian tugas akhir. Untuk mengatasi masalah ini, perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas bimbingan, mengoptimalkan sumber daya, dan menyederhanakan prosedur administratif. Ini mencakup pengembangan sistem manajemen informasi yang lebih baik dan pelatihan profesional bagi dosen. Dengan perbaikan ini, perguruan tinggi dapat memastikan proses kelulusan yang lebih efektif, menghasilkan lulusan yang kompeten, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta reputasi akademik institusi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- I Made, P. D. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram UniversityPess, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, cetakan ke-15, Jakarta.

### **Jurnal**

- Amedi, Azeem Marhendra. (2018). Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). *PLEADS Padjadjaran Law Research & Debate Society*. 6
- Ariestya, Winda Widya. (2016). Decision Tree Learning Untuk Penentuan Jalur Kelulusan Mahasiswa. *JURNAL ILMIAH FIFO*. 8(1).
- Bafadal, Robyan. (2023). Peningkatan Kualitas Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa STIA Muhammadiyah Selong. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*. 2(2).
- Darmansyah, A. (2023). Problematika Mahasiswa Semester Akhir Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir KKKU Skripsi Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry. *UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi*.
- Effrata. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 08 (02).
- Kencana, S., & Muzzamil, F. (2022). Pengaruh Optimisme Terhadap Stres Akademik Pada Mahasiswa Yang Sedang Mengerjakan Skripsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19).
- Pramudiyanto, Alvian, dkk. (2024). Pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Perguruan Tinggi di Kota Surabaya. *Publishing*. 1(3).

- Ratnasari, G., & Nurislaminingsih, R. (2017). PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DI E-JOURNAL TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI MENULIS KARYA ILMIAH MAHASISWA ILMU PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2009. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(1)
- Saepudin, A. (2018). Problematika dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Teknodik*, 4(15)
- Turnip, L. B., Rosmiati, & Nasori, A. (2022). Pengaruh Reputasi Perguruan Tinggi Dan Kualitas Layanan Perkuliahan Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Jurusan Pips Angkatan 2018-2019 Fkip Universitas Jambi. *Journal of Economic Education*, 1(1), 35–43.
- Yayuk Zulaikah, Mujamil Qomar, & Abd. Aziz. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Di Indonesia Menuju Perguruan Tinggi Unggul . *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3)
- Zebua, Yelisman. (2021). KESIAPAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN IKIP GUNUNGSITOLI. *Jurnal JRPP*. 4 (1).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

### Website

- Arief Maulana. (2023). *Universitas Padjadjaran. (2023). Integritas Akademik: Marwah Perguruan Tinggi yang Tergerus Regulasi.* UNIVERSITAS PADJAJARAN. <https://www.unpad.ac.id/2023/06/integritas-akademik-marwah-perguruan-tinggi-yang-tergerus-regulasi/>. diakses pada tanggal 27 Juli 2024.
- Bamawa. *Hak Mahasiswa, Kewajiban mahasiswa, Larangan bagi Mahasiswa, Sanksi.* INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA. <https://bamawa.isi.ac.id/kemahasiswaan/hak-dan-kewajiban-mahasiswa/>. diakses pada tanggal 27 Juli 2024.
- Kliping-um. (2018). *BAYU SKAK AKHIRNYA DIWISUDA UM. KLIPING.* <https://kliping.um.ac.id/?s=bayu+skak>. diakses pada tanggal 27 Juli 2024.
- Romanti. (2023). *Berbagai Alternative Tugas Akhir Pengganti Skripsi, Tesis, dan Disertasi.* INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIC INDONESIA <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/berbagai-alternatif-tugas-akhir-pengganti-skripsi-tesis-dan-disertasi/>. diakses pada tanggal 27 Juli 2024.
- Salmaa. (2021). *Menilik Peran Dosen dalam Implementasi Kampus Merdeka.* DUNIADOSEN.COM. <https://duniadosen.com/peran-dosen-dalam-implementasi-kampus-merdeka/>. diakses pada tanggal 27 Juli 2024.